



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Propemperda), dimana hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa guna mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 153), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 26 Oktober 2023;
 2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024 tanggal 29 November 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Dengan keluarnya Keputusan ini diminta kepada OPD pemrakarsa melalui Bupati Lima Puluh Kota untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan Pembahasan Ranperda dimaksud.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 29 November 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KETUA,**



DENI ASRA, S.Si

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Bpk. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Sdr. Masing-masing Kepala OPD Pemrakarsa.
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nomor : 6 Tahun 2023
 Tanggal : 29 November 2023
 Tentang : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024

RANPERDA USULAN BARU

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampaian	Pemrakarsa	Ker.
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1	PERDA	Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa	Upaya kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.	V		Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kesehatan	V		Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD dr. Ahmad Darwis, Polres, Kodim, BPJS, Bagian Keera, Bapelitbang	April 2024	Dinas Kesehatan	
2	PERDA	Kawasan Tanpa Rokok	Pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok serta dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.			Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan	V		Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Kesbangpol, Dinas Sosial, BNN, Polres	April 2024	Dinas Kesehatan	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Target Penyerampaan	Pemrakarsa	Ket.
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
3	PERDA	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan	V		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	V		Bapelitbang	Oktober 2024	Bapelitbang	
4	PERDA	Kemudahan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal	Kemudahan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal	V		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	V		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Oktober 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
5	PERDA	Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Lima Puluh Kota	Sebagai dasar penanganan kekumuhan serta penganggaran dalam penanganan kumuh yang memuat kriteria ekekumuhan, tata cara identifikasi, penilaian, penetapan lokasi, pencegahan kumuh serta peningkatan kualitas perumahan kumuh.	V		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang	V		Dinas Lingkungan Hidup Permukiman Rakyat dan Bapelitbang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Oktober 2024	Dinas Lingkungan Hidup Permukiman Rakyat dan Permukiman	
6	PERDA	Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045	Tentang rencana umum penanaman modal.	V		Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal	V		Dinas Lingkungan Hidup Permukiman Rakyat dan Permukiman	Oktober 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

RANPERDA LUNCURAN PROPEMPERDA TAHUN 2023

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Target Penyerapan	Pemrakarsa	Ket.
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
7	PERDA	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045	V		<p>Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p>	V	Bapelitbang dan semua OPD di Kabupaten Lima Puluh Kota	November 2024	Bapelitbang		
1	PERDA	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	V		<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p>	V	Badan Keuangan	2024	Badan Keuangan	Proses Evaluasi	
2	PERDA	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Inventarisasi Lingkungan hidup Penetapan wilayah ekoregion Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	V		<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	V	Dinas Lingkungan Hidup Pemukiman Rakyat dan Permukiman	2024	Dinas Lingkungan Hidup Pemukiman Rakyat dan Permukiman	Proses Fasilitas	
3	PERDA	Pembentukan Nagari Koto Tinggi Maek Kecamatan Bukit Barisan	Batas Nagari Kewenangan Lembaga Kemasyarakatan	V		<p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa</p>	V	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari	2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari	Proses Evaluasi	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Target Penyerapan	Pemerakasa	Ket.
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
4	PERDA	Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan	Pelestarian adat minangkabau dan pemajuan kebudayaan yang memuat pokok-pokok pikiran kebudayaan serta tata cara perlindungan dan pemeliharannya oleh pemerintah	V	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau	V		Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga	Mei 2024	DPRD		
5	PERDA	fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	Jenis Pendidikan Keagamaan Keterliban Masyarakat Bentuk-bentuk fasilitas Penghargaan	V	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	V		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Bagian Kesra Sekretariat Daerah	November 2024	DPRD		
6	PERDA	Pemberdayaan Pemuda	Pemberdayaan pemuda Pemberian penghargaan Organisasi pemuda di daerah	V	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang Keperundaan	V		Disparpora, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan	November 2024	DPRD		
7	PERDA	Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterliban Umum	Pengakuan Perda Pembinaan PPNS	V	Undang-Undang Nomor 23 tahun 214 tentang Pemerintahan Daerah	V		Satuan Polisi Pamong Praja	November 2024	DPRD		

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit / Instansi Terkati	Target Penyerapan	Penyakit	Ket.
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau Keterangan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	PERDA	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023	Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021	V		PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	V		Badan Keuangan, DPRD, Bagian Hukum Setda, Bapelitbang	Juni 2024	Badan Keuangan	
2	PERDA	Perubahan APBD Tahun 2024	APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024		V	PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	V		Badan Keuangan, DPRD, Bagian Hukum Setda	September 2024	Badan Keuangan	
3	PERDA	APBD Tahun 2025	APBD Tahun Anggaran 2025	V		PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	V		Badan Keuangan, DPRD, Bagian Hukum Setda	Oktober 2024	Badan Keuangan	

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal November 2023

